



Pajak Hiburan



Pajak Pencahayaan
Jalan Umum



Pajak Pabrik



Pajak Mineral/
Bukan Logam &
Batuan

RENCANA KERJA 2024



Pajak Hotel



Pajak Ritel



Pajak Parkir



Pajak Bumi dan
Bangunan
Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-
P2)



Bea Perolehan
Hak Atas Tanah
dan/atau
Bangunan
(BPHTB)



Pajak Air Tanah



Pajak Sarang
Burung Walet

BADAN PENDAPATAN DAERAH

KOMPLEKS PERKANTORAN JAJAWAY
TELEPON (0266) 433680 FAX.(0266) 433680
Website : www.bapenda.sukabumikab.go.id
Email : bapenda@sukabumikab.co.id



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunianya kami dapat menyusun Rencana Kerja (BAPENDA) Tahun Anggaran 2024.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/ kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2024 dan sebagai review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dapat berjalan sesuai dengan Rencana Kerja yang telah ditetapkan. Melalui Rencana Kerja ini juga diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan terkait dengan Rencana Kerja BAPENDA dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Sukabumi.

Kami menyadari bahwa penyusunan RENJA ini belum sempurna, oleh karena itu kami terbuka menerima kritik dan saran yang konstruktif. Terimakasih.

Palabuhanratu, Maret 2023

KEPALA,



HI. AISAH, SE. AK., M.Sc
Pembina Utama Muda
NIP. 1966021319900320

DAFTAR ISI

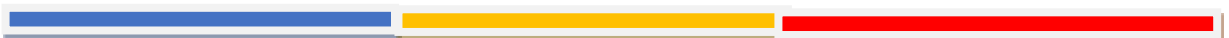
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-7
1.4 Sistematika Penulisan	I-7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKA DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD ...	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD	II-17
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	II-18
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal PD	II-20
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-21
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	III-1
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV-1
BAB V PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Target dan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022	II-7
Tabel 2.2	Indikator Kinerja pada Program Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022..	II-7
Tabel 2.3	Indikator Kinerja pada Program Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2022	II-7
Tabel 2.4	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPENDA dan Pencapaian Renstra PD sampai dengan Tahun 2022	II-14
Tabel 2.5	Realisasi Kinerja SKPD 2020-2022 dan proyeksi 2023	II-17
Tabel 2.6	Rekapitulasi Pagu per Program/Kegiatan	II-20
Tabel 2.7	Usulan Program/ Kegiatan dari Masyarakat Tahun 2024	II-21
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran BAPENDA	III-2
Tabel 3.2	Strategi dan Kebijakan BAPENDA	III-3
Tabel 4.1	Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2024	IV-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alur Penyusunan Renja	I-2
------------	-----------------------------------	-----



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka waktu periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Badan Pendapatan dan Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021– 2026. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Renstra BAPENDA. Program dan Kegiatan yang ada di Renja BAPENDA tercantum dalam Renstra BAPENDA yang selanjutnya menjadi dasar/ pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Perangkat Daerah (PD) diwajibkan mempunyai Rencana Kerja (Renja) sebagai Rencana pelaksanaan kegiatan Tahunan yang tertuai dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Untuk itu berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) jangka waktu 5 tahun Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi, dijabarkan lebih lanjut kedalam perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi.

Perbedaan mendasar sistematika dan hierarki dokumen perencanaan sebelum dan setelah Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 11) adalah Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah (Renja PD) yang menjadi pertimbangan penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Artinya sebelum Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Perangkat Daerah hanya fokus pada perencanaan strategis (Renstra) untuk periode 5 Tahun sementara sekarang dokumen tersebut harus diterjemahkan setiap Tahun dalam bentuk Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana kerja Badan Pendapatan Daerah melalui proses mulai dari persiapan, pendataan, pengolahan analisa, telaahan, hingga penyusunan yang menjadi Rancangan Kerja PD (RKPD). Berikut bagan alir penyusunan Renja dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Alur Penyusunan Renja



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang Undang, Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang Undang, Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang Undang, Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2209 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 604);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 27. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
 28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 30. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 No 7, Tambahan Lembaran Daerah No 236);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 No 8, Tambahan Lembaran Daerah No 237);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 3 Seri A);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2013 Nomor 20);

45. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 4);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat 8/192/2021);
47. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 94 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 94).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 adalah sebagai pedoman dan arah di dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi.

Adapun tujuan penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah adalah :

1. Sebagai pedoman Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengendali kegiatan di Bapenda agar terarah dan sesuai dengan Visi, Misi, Strategi, Kebijakan dan Program yang telah ditetapkan;
2. Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan;
3. Terwujudnya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan arah yang terpadu dengan strategi yang tepat dan terukur.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini memuat pengertian Renja PD sesuai Renstra PD proses penyusunan Renja PD, Penjelasan tentang peraturan perUndang-Undangan dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD. Maksud dan tujuan disusunnya Renja PD. Serta sistematika Renja PD menurut Pasal 143 Permendagri 54 Tahun 2010.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Pada Bab ini mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022,

berdasarkan realisasi target kinerja keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan, serta capaian dari target program/ kegiatan Renstra PD.

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada Bab ini memuat tujuan dan sasaran Renja untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Sukabumi terpilih sesuai Renstra Badan Pendapatan Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAANPERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan 2024 beserta pendanaannya

BAB V PENUTUP

Pada Bab ini menjelaskan catatan penting pelaksanaan rancangan Rencana Kerja (Renja).

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah harus sejalan dengan arah kebijakan Pembangunan daerah yang telah ditetapkan baik dalam RPJPD RPJMD maupun Renstra BAPENDA Tahun 2021-2026. Salah satu Isu Strategis pembangunan Kabupaten Sukabumi adalah “Reformasi Birokrasi”. Secara Singkat Reformasi Birokrasi diartikan sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan tujuan dari Reformasi Birokrasi adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan Aparatur berintegritas tinggi, produktif dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik.

Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7); sesuai dengan Pasal 4 huruf e, nomor 3 dan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 94 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dilanjutkan dengan Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodesifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Hal tersebut mengubah Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan Nomer 94 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Bapenda yang terdiri dari:

Tugas BAPENDA menurut Pasal 4 ayat (1) bahwa BAPENDA mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pendapatan Daerah.

BAPENDA menurut Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 94 Tahun 2021 memiliki fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendataan, penagihan dan pengendalian;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan; bidang pendataan, penagihan dan pengendalian; Kelompok Jabatan Fungsional dan unit kerja lainnya di lingkungan Badan;
- d. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas kesekretariatan; bidang pendataan, penagihan dan pengendalian; Kelompok Jabatan Fungsional dan unit kerja lainnya di lingkungan Badan;
- e. pembinaan Administrasi di Lingkungan Badan.
- f. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang Pendapatan Daerah;
- g. pembinaan pelayanan publik di lingkungan Badan pendapatan Daerah;
- h. pembinaan terhadap pengelola pendapatan asli daerah dan wajib pajak;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- j. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Susunan organisasi BAPENDA terdiri dari:

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Keuangan;
 2. Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pelayanan dan Pendataan;
 2. Sub Bidang Penetapan;
 3. Sub Koordinator Verifikasi.
- d. Bidang Penagihan dan Pemeriksaan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Penagihan;
 2. Sub Bidang Pemeriksaan;
 3. Sub Koordinator Pengaduan dan Keberatan.

- e. Bidang Perencanaan dan Pengendalian, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
 - 2. Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian;
 - 3. Sub Koordinator Data dan Informasi.
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat dan Bidang-bidang:

1. Sekretariat,

Tugas Pokok : melaksanakan fungsi Badan di bidang kesekretariatan

Fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat;
- b. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang Umum dan Kepegawaian, keuangan, Perencanaan dan evaluasi;
- c. pelayanan administratif kepada unit organisasi di lingkungan Badan;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bidang di lingkungan Badan;
- e. pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi di bidang kesekretariatan;
- f. pengkajian dan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan;
- g. pengkajian dan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan;
- h. pengkajian dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan;
- i. pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Badan;
- j. pembinaan kesejahteraan pegawai di lingkungan Badan;
- k. penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Badan;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- m. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- n. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- o. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

2. Bidang Perencanaan dan Pengendalian

Tugas Pokok : melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang Perencanaan dan Pengendalian.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang perencanaan dan pengendalian;
- b. pembinaan, pengumpulan, pengolahan data dan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan evaluasi di bidang perencanaan dan pengendalian; pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan: pendataan Sub Koordinator pelayanan dan pendataan, sub bidang verifikasi, sub bidang penetapan;
- c. perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur bidang perencanaan dan pengendalian; sub bidang perencanaan dan pengembangan, sub bidang evaluasi dan pengendalian, dan sub koordinator data dan informasi;
- d. pengkoordinasian penyusunan kajian potensi pajak daerah dan retribusi daerah; pengkoordinasian pengelolaan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah;
- e. pengkoordinasian perencanaan, pengembangan, koordinasi dan kerjasama pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. pengkoordinasian dalam koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, dan lembaga terkait lainnya;
- g. pengkoordinasian penyusunan bahan rancangan dan peraturan perundang-undangan;
- h. pengkoordinasian fasilitasi penyusunan standar operasional prosedur (SOP);
- i. pengkoordinasian evaluasi dan pengendalian terhadap piutang dan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- j. pengkoordinasian penyusunan rencana tindak lanjut terhadap ketidakpatuhan pajak daerah dan retribusi daerah;
- k. pengkoordinasian penyusunan laporan pendapatan daerah;
- l. pengkoordinasian pengelolaan, pemanfaatan, informasi dan dokumentasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- m. pengkoordinasian pelayanan retribusi daerah;
- n. pengkoordinasian pengelolaan dan pemeliharaan jaringan dan sistem informasi manajemen pajak daerah dan retribusi

daerah;

- o. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- p. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- q. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
- r. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

3. Bidang Penagihan dan Pemeriksaan,

Tugas Pokok : melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang
Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Penagihan dan Pemeriksaan;
- b. pengumpulan, pengolahan data dan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan evaluasi bidang penagihan dan pemeriksaan;
- c. perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur bidang Penagihan dan pemeriksaan; sub bidang Penagihan, Sub Bidang Pemeriksaan dan Sub Koordinator Pengaduan dan Keberatan;
- d. pengkoordinasian pengelolaan penagihan pajak daerah dan penyelesaian piutang pajak daerah;
- e. pemberian pembatalan, penghapusan, pembetulan keringanan, keberatan, pengurangan dan kelebihan pembayaran pajak daerah; pengelolaan Penagihan Pajak Daerah;
- f. pengkoordinasian pemeriksaan terhadap wajib pajak, tujuan pengujian kepatuhan dan tujuan lainnya;
- g. pengkoordinasian kertas kerja, laporan dan pengajuan rekomendasi hasil pemeriksaan;
- h. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

4. Bidang Pendataan dan Penetapan

Tugas Pokok : melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang Pendataan dan Penetapan.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang pendataan dan penetapan;
- b. pembinaan, pengumpulan, pengolahan data dan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan evaluasi di bidang pendataan dan penetapan;
- c. perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur bidang pendataan dan penetapan; sub bidang pelayanan dan pendataan, sub bidang penetapan dan sub koordinator verifikasi;
- d. pengkoordinasian pengelolaan Pendataan, pendaftaran dan penilaian Pajak Daerah;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan pajak daerah;
- f. pengkoordinasian pengelolaan Daftar Induk Wajib Pajak dan menerbitkan Kartu NPWPD;
- g. pengkoordinasian penunjukan dan pengukuhan Wajib pungut, Wajib Pajak dan Surat Keterangan NJOP;
- h. pengkoordinasian penerbitan nota perhitungan, penetapan, pencetakan dan pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
- i. pengkoordinasian verifikasi dokumen hasil pengajuan dari wajib pajak;
- j. pengkoordinasian verifikasi lapangan yang berkaitan atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
- k. pengkoordinasian penetapan keabsahan hasil verifikasi lapangan;
- l. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- m. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;

- n. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
- o. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

A. Capaian Kinerja Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sasaran Strategis Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dicapai melalui Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah dengan 14 Sub Kegiatan sebagai penunjang peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Capaian sampai dengan Triwulan IV dapat dilihat melalui indikator-indikator sebagai berikut:

Tabel 2.1
Target dan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022

URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4
PAJAK DAERAH	Rp 284.433.000.000,00	Rp 296.141.722.905,00	104,12
RETRIBUSI DAERAH	Rp 12.726.360.000,00	Rp 12.363.214.882,00	97,15
JUMLAH	Rp 297.159.360.000,00	Rp 308.504.937.787,00	103,82

Tabel 2.2
Indikator Kinerja pada Program Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi *)	% capaian
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kenaikan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	%	5,13%	2,27 %	44,25 %

*) data 2022 sampai dengan Triwulan IV.

Tabel 2.3
Indikator Kinerja pada Program Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi *)	% capaian
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kenaikan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	%	5,13%	3,73 %	72,71 %

*) data 2022 sampai dengan Triwulan IV

Badan Pendapatan Daerah melaksanakan 1 kegiatan dengan 14 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 6.026.672.300 dengan realisasi sebesar Rp 5.883.094.900 atau terserap 97,62%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

1.1 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000 terealisasi Rp. 39.253.400 atau 78,51%. Hasil Keluaran yaitu dokumen Dokumen Laporan Potensi Pajak Daerah sebanyak 1 Dokumen;
2. Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 581.438.300 terealisasi sebesar Rp. 495.228.800 atau 85,17 %. Hasil keluaran kegiatan yaitu 1 Dokumen hasil penyusunan Kebijakan pajak Daerah, 1 Dokumen Laporan Grand Design, dan 1 Dokumen Laporan Penyusunan Perda Pajak Daerah;
3. Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 83.492.500 terealisasi sebesar Rp. 79.072.500 atau 94,71 %. Hasil keluaran kegiatan yaitu Workshop Pajak Daerah di 47 kecamatan;
4. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 342.212.400 teralisasi sebesar Rp. 326.593.000 atau 95,44 %. Hasil Keluaran kegiatan yaitu Sarana Penunjang Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah sebanyak 12 jenis;
5. Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.783.464.400 teralisasi sebesar Rp. 2.769.359.400 atau 99,49 %. Hasil keluaran kegiatan yaitu Dokumen Laporan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah sebanyak 1 Dokumen;
6. Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 737.733.200 teralisasi sebesar Rp. 734.570.200 atau 99,57 %. Hasil keluaran kegiatan yaitu Jumlah Aplikasi yang di kembangkan sebanyak 6 Sistem, Jumlah Peserta untuk Sosialisasi sebanyak 77 orang;
7. Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan anggaran sebesar 22.611.200 terealisasi 21.208.000 atau 93,79%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Dokumen Pelaporan Hasil Penilaian sebanyak 1 Dokumen;
8. Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 425.500.800 terealisasi sebesar Rp. 419.245.600 atau 98,53 %. Hasil keluaran

- kegiatan yaitu Dokumen Laporan Hasil Penetapan Pajak Daerah sebanyak 1 Dokumen;
9. Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 46.480.000 terealisasi sebesar Rp. 46.380.000 atau 99,78 %. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Dokumen Laporan Hasil Penetapan Pajak Daerah sebanyak 1 Dokumen;
 10. Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 55.000.000 terealisasi sebesar Rp.54.263.000 atau 98,66%. Hasil Kluaran kegiatan yaitu Dokumen laporan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah sebanyak 1 Dokumen;
 11. Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 636.624.600 terealisasi sebesar Rp. 635.946.600 atau 99,89 %. Hasil keluaran kegiatan yaitu Dokumen Laporan Penagihan Pajak Daerah sebanyak 1 dokumen;
 12. Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 56.999.000 terealisasi sebesar Rp. 56.999.000 atau 100%. Hasil keluaran kegiatan yaitu Dokumen Penyelesaian Keberatan pajak Daerah sebanyak 1 dokumen;
 13. Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 110.076.000 terealisasi sebesar Rp. 110.076.000 atau 100%. Hasil keluaran kegiatan yaitu Dokumen Hasil Evaluasi Pajak Daerah sebanyak 1 dokumen;
 14. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 95.039.900 terealisasi sebesar Rp. 94.899.400 atau 99,85 %. Hasil keluaran kegiatan yaitu Dokumen Laporan hasil Pengawasan pengelolaan Retribusi Daerah sebanyak 1 Dokumen .

Penunjang kegiatan dan beberapa sub kegiatan dengan rincian yaitu :

I. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 82.503.200 teralisasi Rp. 82.040.200 atau 99,44%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Dokumen Laporan Perencanaan sebanyak 1 Dokumen.
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 dengan anggaran sebesar Rp. 9.802.500 terealisasi Rp. 9.802.500 atau 100%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023 sebanyak 1 Dokumen.

3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusuna Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 9.802.500 terealisasi Rp. 9.802.500 atau 100%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun 2022 sebanyak 1 Dokumen.
4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 9.802.500 terealisasi Rp. 9.802.500 atau 100%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 sebanyak 1 Dokumen.
5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 11.002.500 terealisasi Rp. 11.002.500 atau 100%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2022 sebanyak 1 Dokumen.
6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 33.892.800 terealisasi Rp. 33.892.800 atau 100%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Dokumen Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja sebanyak 1 Dokumen
7. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 62.177.400 terealisasi Rp. 62.014.400 atau 99,74%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 1 Dokumen.

II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 23.683.200 terealisasi Rp. 23.683.000 atau 100%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Dokumen Laporan Pelaksanaan Akutansi sebanyak 1 Dokumen;
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 39.566.000 terealisasi Rp. 39.566.000 atau 100%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Dokumen laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran sebanyak 12 Dokumen;
3. Sub Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan anggaran sebesar Rp 27.513.600 terealisasi Rp. 27.513.600 atau 100%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Dokumen Dokumen Prognosis Anggaran sebanyak 1 Dokumen.

III. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 5.775.600 terealisasi Rp. 5.775.600 atau 100%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Dokumen Laporan Kebutuhan Barang sebanyak 1 Dokumen;
2. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 6.467.500 terealisasi Rp. 6.403.300 atau 99,01%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Dokumen Laporan Kebutuhan Barang sebanyak 1 Dokumen;
3. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 17.676.800 terealisasi Rp. 17.676.800 atau 100%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Laporan hasil Rekonsiliasi Barang Milik daerah sebanyak 1 Dokumen.

IV. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai dengan anggaran sebesar Rp. 0 terealisasi Rp. 0 atau 0 %. Tidak ada Keluaran Hasil Sub Kegiatan;
2. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan anggaran sebesar Rp. 103.840.000 terealisasi Rp. 103.384.520 atau 99,56%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Pakaian Harian Pegawai sebanyak 118 stel, Pegawai 118,00 stel Pakain batik sebanyak 118 stel;
3. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan anggaran sebesar Rp. 20.423.300 terealisasi Rp. 20.423.300 atau 100%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Pendataan Administrasi Kepegawaian sebanyak 12 Dokumen;
4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian dengan anggaran sebesar Rp. 6.755.600 terealisasi Rp. 6.755.600 atau 100%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Dokumen Pengelolaan data pegawai sebanyak 1 Dokumen;
5. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan anggaran sebesar Rp 7.071.600 terealisasi Rp. 7.066.400 atau 99,93%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Dokumen Pengelolaan data pegawai sebanyak 1 Dokumen;
6. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran sebesar Rp. 0 terealisasi Rp. 0 atau 0%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Laporan Hasil Pelatihan Pegawai sebanyak 1 Dokumen;

7. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran sebesar Rp. 235.980.000 terealisasi Rp. 235.028.000 atau 99,60%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu

V. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 31.251.000 terealisasi Rp. 31.201.000 atau 99,84%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Jumlah Jenis Komponen Listrik sebanyak 20 Jenis;
2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 107.138.400 terealisasi Rp. 99.586.000 atau 92,95%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebanyak 12 jenis;
3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran sebesar Rp. 45.246.650 terealisasi Rp. 44.098.100 atau 97,46%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Penyediaan Peralatan Rumah Tangga kantor sebanyak 43 Jenis;
4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 425.130.414 terealisasi Rp. 418.745.250 atau 98,50%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Tersedianya Bahan Logistik Kantor sebanyak 67 jenis;
5. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 292.990.200 terealisasi Rp. 291.406.455 atau 99,46%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Cetakan kantor sebanyak 29 Jenis;
6. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp. 17.500.000 terealisasi Rp. 17.300.000 atau 98,86%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Belanja Koran Badan Pendapatan Daerah selama 12 bulan;
7. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan anggaran sebesar Rp. 29.640.000 terealisasi Rp. 27.940.000 atau 94,26%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu fasilitas Makanan dan Minuman Tamu selama 12 bulan;
8. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 388.949.000 terealisasi Rp. 325.123.454 atau 83,59%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Dokumen Laporan Rapat Koordinasi Badan sebanyak 12 dokumen;
9. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 10.970.400 terealisasi Rp. 10.807.400 atau 98,51%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Dokumen laporan Arsip sebanyak 1 dokumen;
10. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000 terealisasi Rp.

49.550.000 atau 99,10%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Sistem Laporan Perjalanan Dinas (SI-NANAS) sebanyak 1 sistem.

VI. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 0 terealisasi Rp. 0 atau 0 %. Tidak ada Keluaran Hasil Sub Kegiatan;
2. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 290.097.000 terealisasi Rp. 231.661.750 atau 79,86%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Jumlah pengadaan peralatan Kantor sebanyak 8 Jenis;

VII. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp. 1.832.712.000 terealisasi Rp. 1.801.862.200 atau 98,32%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Belanja Honor Dai selama 12 bulan, Belanja Honor Pegawai Non PNS selama 12 bulan;
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 538.190.000 terealisasi Rp. 464.873.126 atau 86,38%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Belanja Air selama 12 bulan, Belanja Internet selama 12 bulan, Belanja Listrik selama 12 bulan.

VIII. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 470.830.000 terealisasi Rp. 431.856.245 atau 91,72%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu umlah Kendaraan roda 4 yang dipelihara sebanyak 7 unit, Jumlah Kendaraan roda 2 yang dipelihara sebanyak 32 unit;
2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 107.307.500 terealisasi Rp. 103.669.251 atau 96,61 %%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Peralatan Kantor yang di Pelihara sebanyak 20 unit;
3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 111.000.000 terealisasi Rp. 110.386.300 atau 99,45 %. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Jumlah rehabilitas gedung kantor yang di pelihara sebanyak 4 unit.

Tabel 2.4
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPENDA dan Pencapaian Renstra PD sampai dengan Tahun 2022

Kode Rekening	Usuran / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan 2022			Target program dan kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ kegiatan Renstra PD s/d 2022		
					Target	Realisasi *)	Tingkat realisasi		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10=5+7+9	11 = 10/4	
	Usuran Penunjang										
	Bidang Keuangan										
	52	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	- Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	27,81%	3,73%	5,45%	3,73%	68,44%	5,08%	12,54%	45,09%
	1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah 1 Dokumen	500%	78,51	100%	78,51	78,51	100	257,02	51,40
	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan 1 Dokumen Pajak Daerah	400%	85,17	100%	85,17	85,17	100	270,34	67,59
	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Penyuluhan Pajak Daerah Melalui Video Edukasi Pajak Daerah 1 Dokumen	500%	94,71	100%	94,71	94,71	100	289,42	57,88
	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 15 Unit	500%	95,44	100%	95,44	95,44	100	290,88	58,18
	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Dokumen Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 1 Dokumen	500%	99,49	100%	99,49	99,49	100	298,98	59,80
	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Dokumen Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 1 Dokumen	500%	99,57	100%	99,57	99,57	100	299,14	59,83
	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		400%	93,79	100%	93,79	93,79	100	287,58	71,90
	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 1 Dokumen	500%	98,53	100%	98,53	98,53	100	297,06	59,41

			9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Dokumen Laporan Pelayanan 1 Dokumen	400%	99,78	100%	99,78	99,78	100	299,56	74,89
			10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi 1 Dokumen	400%	98,66	100%	98,66	98,66	100	297,32	74,33
			11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 1 Dokumen	400%	99,89	100%	99,89	99,89	100	299,78	74,95
			12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 1 Dokumen	400%	100	100%	100	100	100	300	75,00
			13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 1 Dokumen	500%	100	100%	100	100	100	300	60,00
			14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 1 Dokumen	500%	99,85	100%	99,85	99,85	100	299,7	59,94
			15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Dokumen kerjasama non tunai	400%	0	100%	0	0	100	100	25,00

*) Realisasi s/d Triwulan IV 2021

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Target Kinerja SKPD dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.5
Realisasi Kinerja SKPD 2020-2022 dan proyeksi 2023

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				2020	2021	2022*)	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	20%	-	16%	16%	17,35%	18%	Secara umum menunjukkan kenaikan. Walaupun untuk beberapa item, agak sulit untuk menentukan target yang hendak dicapai karena terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah di luar BAPENDA dan Menunjukkan kinerja perpajakan. Upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan
2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Rasio PAD)	100	-	106 %	106 %	107,54 %	100 %	Menunjukkan kinerja perpajakan. Upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan

*) sampai dengan Triwulan IV.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah digambarkan dengan persentase kenaikan. Diharapkan bahwa pendapatan daerah terus meningkat dari tahun ke tahun. Kenaikan PAD menunjukkan kemampuan daerah untuk membiayai kegiatan pembangunannya yang semakin baik.

Realisasi PAD terhadap Target PAD menunjukkan kinerja untuk memenuhi target penerimaan PAD. Segala upaya, termasuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi target yang telah ditentukan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
Faktor Internal	<p>Kekuatan</p> <p>Faktor Internal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki regulasi Pendapatan Asli Daerah 2. Memiliki Proses Bisnis dan SOP dalam pelaksanaan kegiatan 3. Memiliki dokumen perencanaan jangka Panjang, menengah dan pendek dalam melaksanakan kegiatan 4. Memiliki 70 ASN yang mendukung pelaksanaan pencapaian program dan kegiatan Bapenda 5. Aplikasi yang mendukung pelayanan dan penatausahaan pendapatan daerah 	<p>Kelemahan</p> <p>Faktor Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya anggaran peningkatan pendapatan dan pelayanan perpajakan 2. Belum optimalnya kapasitas ASN dalam memenuhi kebutuhan Lembaga sesuai dengan kapasitasnya 3. Belum optimalnya pemutakhiran data potensial secara berkala 4. Belum optimalnya pegawai sesuai kompetensi 5. Minimnya pelayanan yang dekat dengan masyarakat sehingga kepatuhan wajib pajak belum optimal
Faktor Eksternal	<p>Faktor Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya potensi Pendapatan Kabupaten Sukabumi yang dapat dijadikan sumber pendapatan 2. Dukungan dari Wajib Pajak, APH, Perangkat Daerah Penerima Pendapatan, dan Pemungut Pajak Wilayah dalam rangka pelaksanaan kepatuhan pajak. 	<p>Faktor Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pemutakhiran data potensi pendapatan daerah secara berkala 2. Belum maksimalnya pelayanan yang diharapkan Wajib Pajak 3. Belum optimalnya komunikasi yang terstruktur antar desa, kecamatan dan Lembaga
Peluang	<p>Strategi Peluang dan Kekuatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas SDM dalam upaya untuk mengerti potensi pendapatan daerah. 2. Pengembangan berbagai inovasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 3. Pengembangan berbagai program dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan pemungut pajak. 4. Pemutakhiran data potensi pajak secara berkala 	<p>Strategi Kelemahan dan Peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerja sama dengan Lembaga lain dalam rangka meningkatkan kapasitas ASN 2. Kerja sama dengan DKIP terkait pengamanan aplikasi data dan informasi
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan SDM melalui Pelatihan sesuai Analisa jabatan 2. Meningkatkan pelayanan yang dekat dengan masyarakat 3. Penguatan penatausahaan pemungutan pajak di wilayah. 4. Pemutakhiran data potensi pajak secara berkala 		

Ancaman	Strategi Ancaman dan Kekuatan	Strategi Kelemahan dan Ancaman
1. Ketidapatuhan Wajib Pajak 2. Ketidapatuhan Pemungut Pajak 3. Ketidakakuratan data wajib pajak 4. Penyalahgunaan data oleh peretas data 5. Pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak sesuai	1. Peningkatan Kerjasama dengan para APH untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak 2. Kerjasama dengan Auditor (Inspektorat) dalam rangka meminimalisir resiko pelayanan dan pelaksanaan kegiatan 3. Pendataan yang berkelanjutan dalam upaya pemutakhiran data 4. Regulasi pengamanan terkait data dan informasi 5. Peningkatan pemeriksaan dan verifikasi lapangan	1. Penyusunan SOP dalam setiap kegiatan 2. Peningkatan Sosialisasi perpajakan 3. Penyusunan data potensi secara berkala 4. Penetapan Funishment dalam rangka mengurangi ketidakpatuhan Wajib Pajak 5. Peningkatan kualitas pegawai

Masih terdapatnya beberapa permasalahan dan hambatan dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPENDA, diantaranya:

- Belum optimalnya pemutakhiran data potensi pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah
- Sering terjadinya perubahan regulasi pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah
- Belum optimalnya fasilitas pelayanan pajak daerah
- Belum maksimalnya pengelolaan dan penggalian potensi Retribusi Daerah
- Ketidapatuhan Wajib Pajak dan Wajib Pungut dalam melaksanakan kewajiban perpajakan

Adapun upaya dalam menyelesaikan permasalahan dan hambatan dengan melakukan:

- Melakukan pendataan ulang terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
- Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, BUMD dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala
- Meningkatkan komitmen seluruh Stakeholders agar dapat terlaksananya Strategi peningkatan PAD
- Sosialisasi yang terus menerus kepada Wajib Pajak dan Wajib Pungut

- Menyelenggarakan sistem digitalisasi dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah
- Pembuatan Tim PAD lintas Sektor

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perbandingan terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada Lampiran 2. Gambaran umumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Rekapitulasi Pagu per Program/Kegiatan

No	Rancangan Awal RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan	
	Program/Kegiatan	Pagu (000)	Program	Pagu (000)
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.310.817.728	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.310.817.728
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	213.720.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	213.720.000
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.352.917.528	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.352.917.528
4	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	121.264.400	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	121.264.400
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	237.116.800	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	237.116.800
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.198.908.200	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.198.908.200
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.355.090.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.355.090.000
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.178.470.800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.178.470.800
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	653.330.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	653.330.000
II	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.957.307.200	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.957.307.200
1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.957.307.200	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.957.307.200
	Total	28.268.124.928		28.268.124.928

Tidak terdapat selisih antara RKPD dengan hasil analisa kebutuhan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tidak terdapat kegiatan yang berasal dari usulan masyarakat, melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan maupun Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan di BAPENDA Kabupaten Sukabumi.

Tabel 2.7
Usulan Program/ Kegiatan dari Masyarakat Tahun 2024

No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ volume	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
–	–	–	–	–	–

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021-2026 harus sejalan dengan Visi, Misi, serta Arah Kebijakan dan Strategi Kabupaten Sukabumi yaitu *“Mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang religius, Maju dan Inovatif menuju masyarakat yang sejahtera lahir batin.”* Adapun Tugas dan Fungsi BAPENDA yaitu:

a. Tugas

Yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pendapatan Daerah

b. Fungsi

1. penyusunan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah;
2. pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pendataan dan Penetapan; Bidang Penagihan dan Pemeriksaan ; Bidang Perencanaan dan Pengendalian.
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan; Bidang Pendataan dan Penetapan; Bidang Penagihan dan Pemeriksaan ; Bidang Perencanaan dan Pengendalian.; Kelompok Jabatan Fungsional dan unit kerja lainnya di lingkungan Badan;
4. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas kesekretariatan; Bidang Pendataan dan Penetapan; Bidang Penagihan dan Pemeriksaan ; Bidang Perencanaan dan Pengendalian.; Kelompok Jabatan Fungsional dan unit kerja lainnya di lingkungan Badan;
5. pembinaan Administrasi di Lingkungan Badan.
6. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang Pendapatan Daerah;
7. pembinaan pelayanan publik di lingkungan Badan pendapatan Daerah;
8. pembinaan terhadap pengelola pendapatan asli daerah dan wajib pajak;
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
10. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
11. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
12. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan adalah tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam rencana strategis, berasal dari rumusan misi yang memberikan kerangka arah kebijakan yang ingin dicapai dalam menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai misi. Akan tetapi terkendala dengan :

1. Rendahnya Optimalisasi Pendapatan
2. Rendahnya data potensi sumber-sumber pendapatan dan penerimaan daerah dalam rangka peningkatan kemandirian fiskal
3. Rendahnya proporsi PAD terhadap upaya kemandirian Kabupaten Sukabumi

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan. Sasaran dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan dengan memperhatikan isu-isu strategis dan memenuhi kriteria SMART (*Specific Measurable Accountable Result-oriented Time-bound*). Adapun penjelasan dari kriteria SMART yaitu :

1. *Spesific* yaitu Terperinci
2. *Measurable* yaitu Terukur
3. *Accountable* yaitu Dapat Dipertanggungjawabkan
4. *Result oriented* yaitu Berorientasi Pada Tujuan
5. *Time Bound* yaitu Pada Periode Tertentu

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi dan Kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Strategi dan Kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran BAPENDA

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik yang Inovatif, Profesional, dan Akuntabel	Meningkatnya jumlah Pajak daerah dan Retribusi daerah	Meningkatnya Pajak daerah dan Retribusi daerah

Sumber: RPJMD 2021-2026 Kabupaten Sukabumi.

Sedangkan strategi dan kebijakan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Strategi dan Kebijakan BAPENDA

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik yang Inovatif, Profesional, dan Akuntabel	Meningkatnya Pajak daerah dan Retribusi daerah	Memperkuat dan mengembangkan ekstensifikasi dan intensifikasi penggalan potensi Pajak daerah dan Retribusi daerah serta Sumber-Sumber Penerimaan Daerah dengan memperkuat sdm dan penggunaan IT	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun dan membentuk regulasi dalam rangka optimalisasi peningkatan Pajak daerah dan Retribusi daerah yang efektif b. Peningkatan SDM petugas pajak dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang Optimalisasi Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

Sumber: RPJMD 2021-2026 Kabupaten Sukabumi.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menurut Peraturan Kementerian Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 Tentang Sistem informasi Pemerintahan Daerah, Program Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang masuk sebagai PD penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdapat kegiatan :

1. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
9. Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Sedangkan dalam Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terdapat satu kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang terdiri dari 15 Sub kegiatan yaitu :

1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah;
2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah;
3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;
4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah;
5. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;
6. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;
7. Penetapan Wajib Pajak Daerah;
8. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;
9. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah;
10. Penagihan Pajak Daerah;
11. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;
12. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah;
13. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah;

14. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
15. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Berikut penjelasan program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada Tahun 2024 sebagai berikut

Tabel 4.1
Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sukabumi Tahun 2024

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Badan Pendapatan Daerah						28.268.124.928,00							0,00	
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						28.268.124.928,00							0,00	
5	02	KEUANGAN						28.268.124.928,00							0,00	
1	5	02	01					24.310.817.728,00							0,00	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
5	02	01	2.01					213.720.000,00							0,00	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
5	02	01	2.01	0001											0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	53.375.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			
5	02	01	2.01	0002											0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	20.000.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			
5	02	01	2.01	0003											0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	20.000.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			
5	02	01	2.01	0004											0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	20.000.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			
5	02	01	2.01	0005											0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	20.000.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			
5	02	01	2.01	0006											0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	30.345.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			
5	02	01	2.01	0007											0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	50.000.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			
5	02	01	2.02												0,00	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						18.352.917.528,00								
5	02	01	2.02	0001											0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				64 Orang/bulan	18.265.891.128,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			
5	02	01	2.02	0004											0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	27.888.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			
5	02	01	2.02	0007											0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	34.138.400,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			
5	02	01	2.02	0008											0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	25.000.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			
5	02	01	2.03												0,00	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						121.264.400,00								
5	02	01	2.03	0001											0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	10.290.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			
5	02	01	2.03	0002											0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	69.444.400,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			
5	02	01	2.03	0005											0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	41.530.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			

RENCANA KERJA BAPENDA 2024

5	02	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	237.116.800,00	-	-	-	-	-	0,00	
5	02	01	2.05	0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	38.060.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.05	0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	6.322.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.05	0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.05	0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	25.000.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.05	0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	120 Orang	157.734.800,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.198.908.200,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
5	02	01	2.06	0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.209.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06	0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	30.914.200,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06	0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	408.470.050,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06	0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	236.911.400,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06	0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	17.500.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06	0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	20.280.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06	0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	390.370.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06	0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	30.253.550,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06	0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	50.000.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.355.090.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
5	02	01	2.07	0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	993.000.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.07	0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	362.090.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.178.470.800,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
5	02	01	2.08	0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	11.000.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	550.100.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.08	0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.617.370.800,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

5	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	653.330.000,00	-	-	-	-	-	0,00		
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	555.310.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	98.020.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2	5	02	04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	3.957.307.200,00	-	-	-	-	-	0,00		
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	3.957.307.200,00	-	-	-	-	-	0,00		
5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	50.000.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	248.383.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	147.237.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	0 Unit	820.600.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	296.034.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	645.000.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen	560.007.200,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	0 Layanan	60.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	408.258.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	50.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	110.788.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	511.000.000,00	- Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							J U M L A H	28.268.124.928,00							0,00	

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 merupakan perencanaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) BAPENDA Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026, merupakan penjabaran Visi dan Misi Kabupaten Sukabumi. Disamping hal tersebut, Renja juga sebagai dasar dalam penyusunan anggaran pada kegiatan lingkup BAPENDA Kabupaten Sukabumi.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Sukabumi ini diharapkan dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program kegiatan Tahun 2024 dapat dijadikan pedoman bagi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Sukabumi agar sesuai dan saling bersinambungan sehingga dengan adanya Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi dapat digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD.

Palabuhanratu, Maret 2023

KEPALA,


Hi. AISAH, SE, AK, M.Sc
Pembina Utama Muda
NIP. 19620206 198203 1 001